

PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI BANTEN

Dwi Mahroji, email: d_mahroji@yahoo.com

Jurusan Ekonomi Pembangunan STIE Pandu Madania

Iin Nurkhasanah, email: iin.nurkhasanah23@gmail.com

Jurusan Ekonomi Pembangunan STIE Pandu Madania

ABSTRACT

The purpose of the study is to determine the effect of Human Development Index (HDI) investment and District Minimum Wage (MSE) to the unemployment rate in Banten Province and to determine the effect of Human Development Index (HDI), investment and District Minimum Wage (MSE) collectively to the unemployment rate in Banten Province. The method used in this research is panel data analysis method with Fixed Effect Model approach. The result of panel data analysis showed that the variable of Human Development Index (HDI) has significant and negative effect on 5% level to unemployment rate, investment variable has negative and significant effect on 5% level to unemployment rate, District Minimum Wage (MSE) has negative effect and significant at 5% level to unemployment rate and collectively variable of Human Development Index (HDI), investment and District Minimum Wage (MSE) have significant effect to unemployment rate in Banten Province.

Keywords: Unemployment Rate, Human Development Index (HDI) investment and District Minimum Wage (MSE).

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) investasi dan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten dan untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi dan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode analisis data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model. Hasil analisis data panel pada menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan dan negatif pada taraf 5% terhadap tingkat pengangguran, variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan pada taraf 5% terhadap tingkat pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) berpengaruh negatif dan signifikan pada taraf 5% terhadap tingkat pengangguran dan secara bersama-sama variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi dan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten.

Kata Kunci: Tingkat Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Investasi dan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK).

PENDAHULUAN

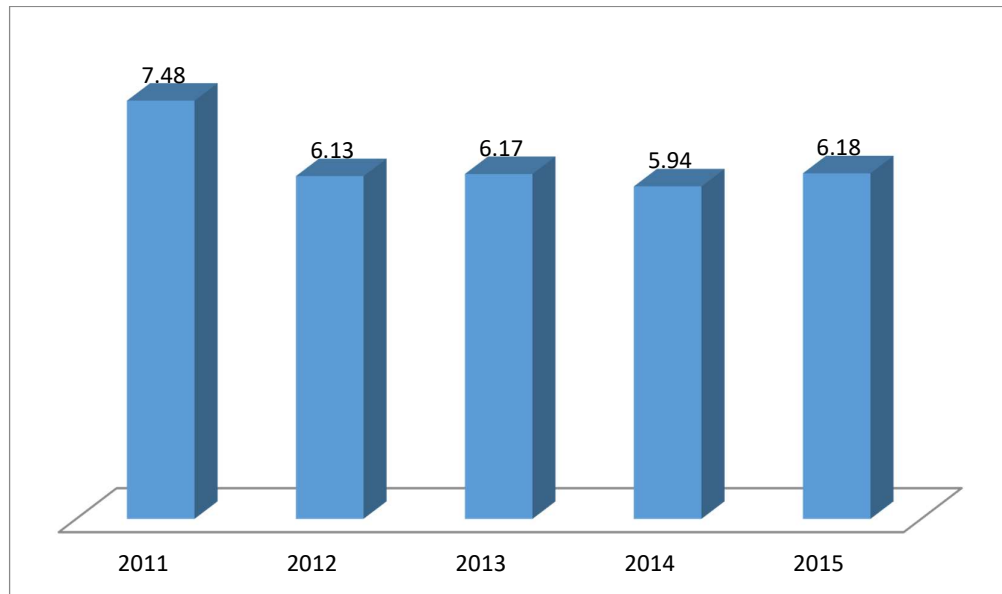
Pembangunan ekonomi merupakan upaya perubahan struktural yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan penduduk. Pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang melibatkan bermacam-macam perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan wilayah, pengentasan kemiskinan serta penurunan tingkat pengangguran (Todaro, 2003).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik. Pertumbuhan ekonomi belum dapat dikatakan berhasil jika beban sosial semakin berat, distribusi pendapatan tidak merata, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan semakin meningkat serta masih tingginya tingkat pengangguran (Noviyanti, 2014).

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang tinggi memiliki potensi pasar yang cukup besar dilihat dari sisi input tenaga kerja. Jumlah penduduk yang besar dapat menggerakkan pasar dari sudut permintaan melalui *multiplier effect* karena adanya *agregat demand* yang tinggi. Sebagai sumber tenaga kerja, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi penggerak perekonomian dari sisi penawaran. Namun, pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja akan mengakibatkan terjadinya masalah ketenagakerjaan seperti semakin tinggi angka pengangguran yang dapat meningkatkan probabilitas kemiskinan, kriminalitas dan fenomena sosial-ekonomi di masyarakat (Wahyuni, 2005).

Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah yang cukup serius dihadapi oleh negara berkembang seperti Negara Indonesia. Menurut Alghofari, 2010 menyatakan bahwa pengangguran terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Besarnya nilai TPT memberikan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (2016), pengangguran terbuka yaitu terdiri dari mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Besarnya tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun 2011-2015 terlihat pada Gambar 1.1 berikut ini:



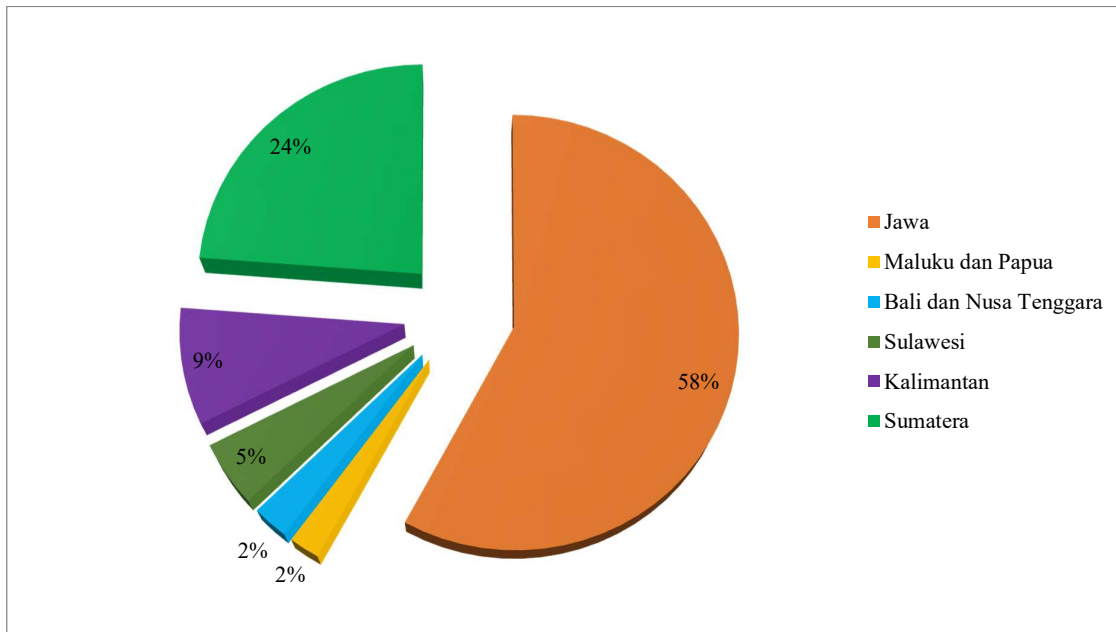
Sumber: BPS Indonesia, 2016

Gambar 1.1

Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 2011-2015 (Persen)

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia berfluktuasi tiap tahunnya. Tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia selama tahun 2011-2015 terjadi pada tahun 2011 sebesar 7,48%, kemudian menurun sampai 6,13% pada tahun 2012, namun pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 6,18%.

Pulau Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sebagai pusat kawasan industri harusnya mampu menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingginya tingkat pengangguran. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi sektor industri di Pulau Jawa yang mampu menyumbang sebesar 58% terhadap PDB nasional. Selain itu, sektor industri di Pulau Jawa mampu menjadi *leading sector* dengan kontribusi sebesar 29,87% terhadap PDRB. Sedangkan wilayah lain masih belum bisa berkontribusi banyak, seperti Pulau Sumatera dan Kalimantan hanya berkontribusi 24% dan 9% (BPS Indonesia, 2016). Berbeda halnya dengan pulau-pulau lain yang berada di wilayah tengah dan timur Indonesia, meskipun wilayah dan potensi alamnya cukup luas namun kontribusinya terhadap perekonomian nasional masih sangat kecil (Gambar 1.2).



Sumber: BPS Indonesia, 2016

Gambar 1.2
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDB Nasional Tahun 2015 (Persen)

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang mempunyai peran penting dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa sejumlah kawasan industri di Provinsi Banten sebagai percontohan dalam pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa. Melalui pembangunan kawasan industri yang terintegrasi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi nasional karena mampu menyediakan lapangan kerja yang luas bagi lingkungan sekitar sehingga masalah pengangguran dapat teratasi (BPS Indonesia, 2016).

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Provinsi Banten memiliki tingkat pengangguran tertinggi di Pulau Jawa selama periode 2011-2015. Pada tahun 2011 tingkat pengangguran di Provinsi Banten mencapai 13,74% kemudian terus mengalami penurunan hingga tahun 2014 hanya mencapai 9,07% dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan hingga mencapai 9,55%. Namun, angka tersebut masih cukup besar jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional pada tahun 2015 hanya sebesar 6,18%. Hal ini menunjukkan masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten karena belum mencapai penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*).

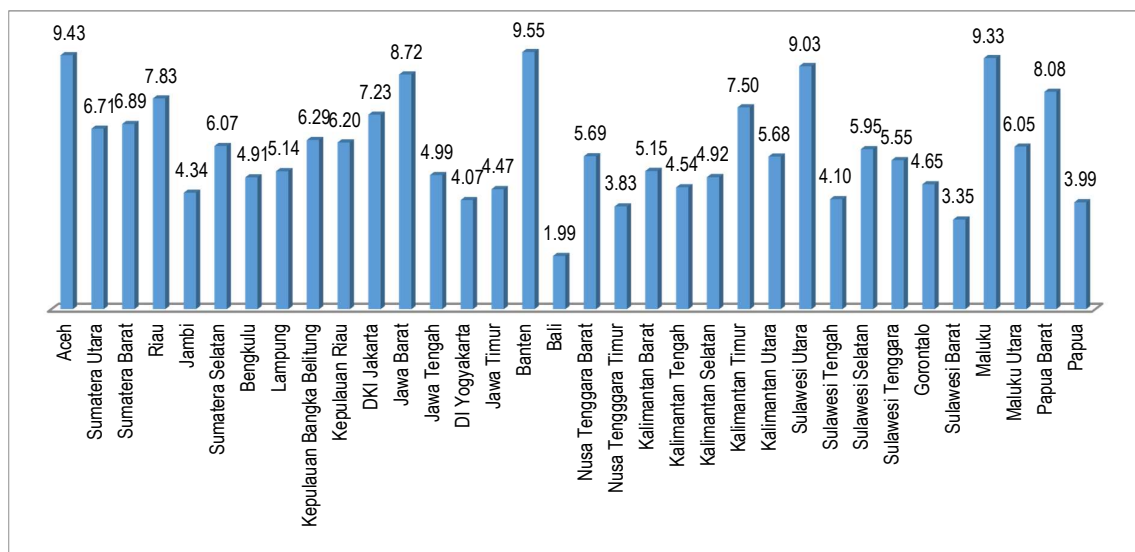
Tabel 1.1
Tingkat Pengangguran di Pulau Jawa Tahun 2011-2015 (Persen)

Provinsi	Tahun					Rata-Rata
	2011	2012	2013	2014	2015	
DKI Jakarta	11.69	9.67	8.63	8.47	7.23	9.14
Jawa Barat	9.96	9.08	9.16	8.45	8.72	9.07
Jawa Tengah	7.07	5.61	6.01	5.68	4.99	5.87

DI Yogyakarta	4.39	3.90	3.24	3.33	4.07	3.79
Jawa Timur	5.38	4.11	4.30	4.19	4.47	4.49
Banten	13.74	9.94	9.54	9.07	9.55	10.37

Sumber: BPS Indonesia, 2016

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Banten berupaya secara konsisten membuka peluang 1 juta lapangan kerja. Pelatihan dan pendampingan juga terus dilakukan serta membuka *job fair* di daerah serta memberikan pelatihan kepada lulusan SMK melalui Balai Latihan Kerja (BLK) (Disnakertrans Banten, 2016). Namun, kerja keras pemerintah belum memberikan hasil yang maksimal, hal ini terlihat bahwa pada tahun 2015 Provinsi Banten menempati posisi tertinggi pertama jika dibandingkan dengan 33 Provinsi lain di Indonesia yakni mencapai 9,55% dari jumlah penduduk Banten, kemudian diikuti dengan Provinsi Aceh sebesar 9,43%. Sedangkan tingkat pengangguran terendah berada di Provinsi Bali hanya mencapai 1,99% (Gambar 1.3).



Sumber: BPS Indonesia, 2016

Gambar 1.3

Tingkat Pengangguran Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2015 (Persen)

Menurut Wahyuni (2005) salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh tingginya pertumbuhan jumlah penduduk. Pada dasarnya, peningkatan jumlah penduduk memiliki dua sisi yang berbeda. Jumlah penduduk yang besar merupakan modal dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, tetapi di sisi lain dengan pengaturan yang tidak tepat, jumlah penduduk yang besar dapat menimbulkan permasalahan penduduk yang sangat krusial terutama dibidang ketenagakerjaan. Tingginya pertumbuhan penduduk apabila tidak disertai dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka mereka tidak mampu menempati lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah tersebut. Kualitas sumber

daya manusia dapat diukur melalui besarnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu angka yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh seseorang (Saputra, 2011). Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2016), menjelaskan bahwa indeks pembangunan manusia dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2016), dalam mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup, selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator angka harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk dapat hidup layak.

Menurut Napitupulu (2007), indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur dan hidup sehat, untuk mendapatkan pengetahuan dan mampu memenuhi standar hidup layak. Semakin baik tingkat kesehatan tenaga kerja, pengetahuan yang tinggi dan memperoleh hidup yang layak, maka hasil kerja akan semakin bagus dan berkualitas, justru sebaliknya semakin buruk keadaan tenaga kerja, maka hasil pekerjaannya akan semakin buruk pula atau tidak berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia menjadi indikator untuk menilai kualitas sumber daya manusia yang siap untuk berkerja sehingga mampu mengurangi tingginya tingkat pengangguran di suatu wilayah. Perkembangan besarnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa pada tahun 2011-2015 terlihat pada Tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa Tahun 2011-2015 (Indeks)

Provinsi	Tahun					Rata-Rata
	2011	2012	2013	2014	2015	
DKI Jakarta	76.98	77.53	78.08	78.39	78.99	77.99
Jawa Barat	66.67	67.32	68.25	68.80	69.50	68.11
Jawa Tengah	66.64	67.21	68.02	68.78	69.49	68.03
DI Yogyakarta	75.93	76.15	76.44	76.81	77.59	76.58
Jawa Timur	66.06	66.74	67.55	68.14	68.95	67.49
Banten	68.22	68.92	69.47	69.89	70.27	69.35

Sumber: BPS Indonesia, 2016

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) enam provinsi di Pulau Jawa terus mengalami peningkatan selama tahun 2011-2015. Provinsi Banten memiliki nilai rata-rata IPM tertinggi ke tiga di Pulau Jawa setelah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar 69.35%. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur masing-masing sebesar 68.11%, 68.03% dan 67.49%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Provinsi Banten sudah cukup baik, namun tingkat pengangguran selama tahun 2011-2015 masih menempati posisi tertinggi pertama jika dibandingkan dengan lima provinsi lainnya di Pulau Jawa (Tabel 1.1).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Burhanudin (2015) mengenai hubungan indeks pembangunan manusia dengan tingkat pengangguran menyimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap tingkat pengangguran. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi angka indeks pembangunan manusia pada suatu wilayah maka akan menyebabkan tingkat pengangguran semakin menurun dan sebaliknya apabila indeks pembangunan manusia rendah akan berdampak pada tingginya tingkat pengangguran di wilayah tersebut.

Menurut Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Melalui investasi pendidikan diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi kualitas manusia, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga dengan penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak menyebabkan berkurangnya tingkat pengangguran (Todaro, 2000).

Hubungan indeks pembangunan manusia dengan tingkat pengangguran juga dijelaskan oleh Todaro (2000), bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran dan pada akhirnya akan tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pembangunan manusia yang diukur melalui besarnya nilai IPM akan berdampak pada rendahnya tingkat pengangguran di suatu wilayah.

Indikator-indikator ekonomi lain yang mempunyai hubungan dengan tingkat pengangguran selain indeks pembangunan manusia diantaranya investasi dan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) yang berlaku. Apabila di suatu negara memiliki investasi yang menjadi salah satu komponen dalam pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, diharapkan akan berhubungan pada penurunan tingkat pengangguran, hal ini diikuti dengan tingkat upah. Jika tingkat upah naik akan berhubungan pada penurunan tingkat pengangguran pula. Sedangkan tingkat inflasi yang tinggi akan berhubungan pada tingkat pengangguran (Sukirno, 2008).

Penelitian yang membahas tentang tingkat pengangguran telah banyak dilakukan seperti Sisnita (2017) dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung menyimpulkan bahwa jumlah penduduk dan

indeks pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan sedangkan upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Lampung tahun 2009-2015. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kristiyana (2011) menyimpulkan bahwa variabel tingkat inflasi berpengaruh signifikan dengan arah negatif sedangkan variabel upah minimum kabupaten/kota dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Komalasari (2014) dengan judul "*Determinants Of Unemployment: Empirical Evidences from 7 Province in Indonesia*" menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristiyana bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Indonesia tahun 2004-2012.

Berdasarkan tingginya tingkat pengangguran di Provinsi Banten jika dibandingkan dengan wilayah sekitar di Pulau Jawa selama tahun 2011-2015 bahkan pada tahun 2015 menempati posisi pertama pada tingkat nasional sebesar 9,55% sedangkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Banten yang diukur berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama tahun 2011-2015 menempati posisi tertinggi ketiga jika dibandingkan dengan wilayah sekitar di Pulau Jawa serta banyaknya faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, maka dalam penelitian ini variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai variabel utama yang mempengaruhi tingkat pengangguran sedangkan variabel investasi dan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) sebagai variabel kontrol yang mempengaruhi tingkat pengangguran.

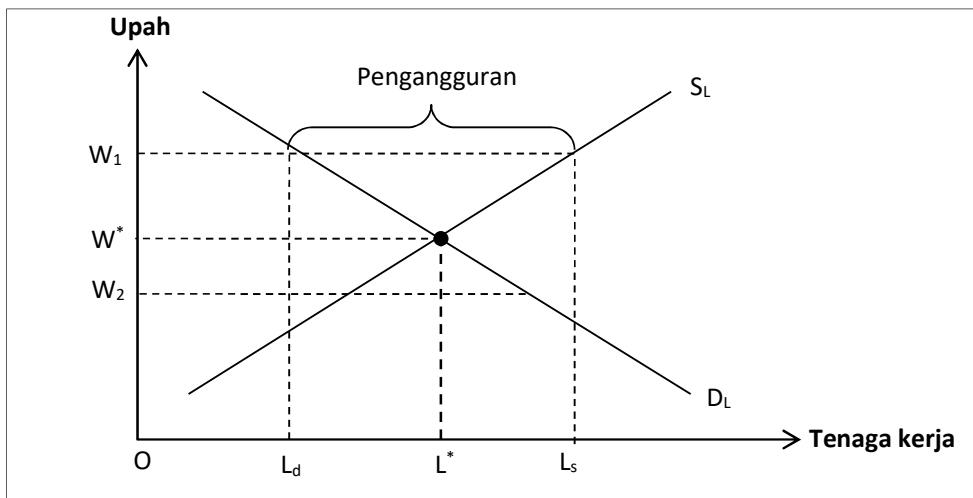
TINJAUAN LITERATUR

Konsep Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu persoalan yang banyak terjadi di suatu wilayah khususnya pada negara berkembang. Menurut Sukirno (2008) pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Menurut Simanjuntak (2003), mengatakan bahwa pengangguran yaitu orang berusia angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2016) pengangguran yaitu terdiri dari mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja. Pada pasar tenaga kerja dikenal kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kurva permintaan tenaga kerja menunjukkan jumlah tenaga kerja yang diminta/dipekerjakan oleh perusahaan dan memiliki kemiringan negatif pada tingkat upah tertentu, sedangkan kurva penawaran tenaga kerja menunjukkan jumlah tenaga kerja yang akan ditawarkan oleh rumah tangga dan berslope positif terhadap upah. Keseimbangan pasar akan tercapai apabila terjadi suatu keadaan dimana jumlah tenaga kerja yang diminta sama dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan pada tingkat upah tertentu (Widiyati, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa apabila jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi

jumlah tenaga kerja yang diminta maka akan mengakibatkan pengangguran. Pada Gambar 2.1 berikut ini menggambarkan keseimbangan yang terjadi di pasar tenaga kerja.



Sumber: Borjas, George J, 2008

Gambar 2.1

Kurva Keseimbangan di Pasar Tenaga Kerja

Berdasarkan Gambar 2.1 menunjukkan bahwa keseimbangan pasar tenaga kerja berada pada titik W^*L^* . Jika upah berada di atas tingkat keseimbangan (W_1) maka jumlah penawaran tenaga kerja akan melebihi jumlah permintaannya. Jika upah berada di bawah tingkat keseimbangan (W_2) maka jumlah permintaan tenaga kerja lebih besar daripada jumlah penawaran tenaga kerja. Ketidakseimbangan inilah yang disebut dengan pengangguran.

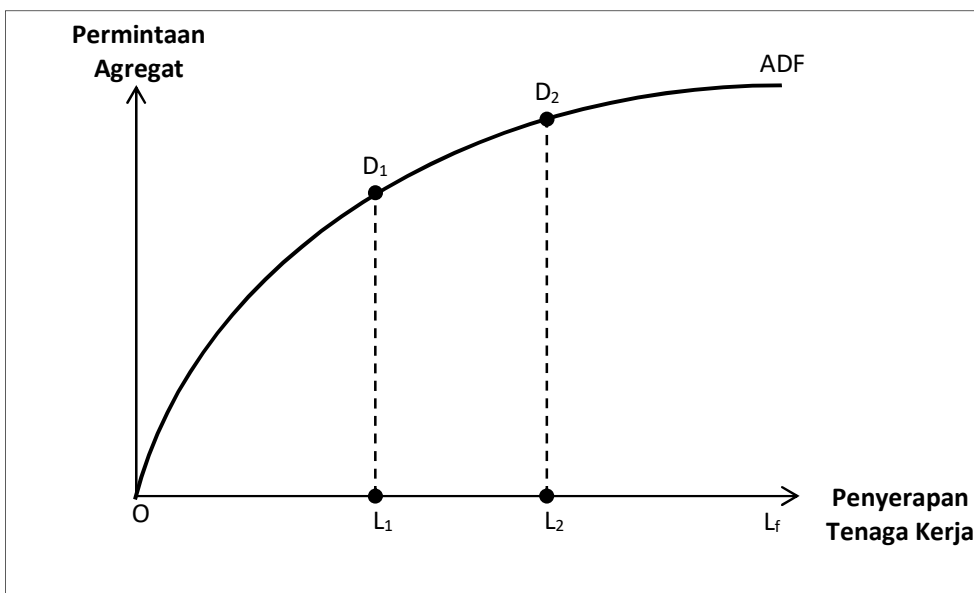
Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Melalui investasi pendidikan diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Peningkatan produktivitas dapat mempengaruhi kesempatan kerja yaitu dengan adanya peningkatan produktivitas maka terjadi penurunan biaya produksi per unit barang. Penurunan biaya produksi per unit barang akan menurunkan harga per unit barang. Jika harga barang turun maka permintaan terhadap barang naik yang akan mendorong pengusaha untuk menambah permintaan tenaga kerja, sehingga dengan penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak dapat mengurangi tingkat pengangguran (Todaro, 2000).

Menurut Nanang (2004), Produktivitas tenaga kerja menentukan kondisi permintaan tenaga kerja, apabila produktivitas tenaga kerja itu rendah otomatis akan menurunkan pencapaian target perusahaan. Produktivitas yang rendah akan membuat perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan para tenaga kerja sehingga akan meningkatkan tingkat pengangguran di suatu wilayah. Menurut Abbas (2010) kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja yang diberikan oleh pendidikan pada

dasarnya terkait dengan lima hal yaitu: motif atau penggerak, kecepatan bereaksi, gambaran diri pribadi, informasi seseorang yang diperoleh pada bidang tertentu dan kemampuan melaksanakan tugas secara fisik maupun mental (*skill*). Tenaga kerja yang berkualitas dan lebih mempunyai kemampuan akan lebih dihargai jika dibandingkan dengan tenaga kerja yang kurang mampu. Tingkat pendidikan yang merupakan salah satu indikator dari IPM berpengaruh terhadap tingkat pengangguran karena jika tenaga kerja berpendidikan rendah akan sulit mendapat pekerjaan sehingga akan berdampak pada bertambahnya tingkat pengangguran.

Menurut Teori Keynes menjelaskan bahwa masalah pengangguran timbul disebabkan oleh adanya permintaan agregat yang rendah. Permintaan agregat merupakan seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian. Ketika penawaran tenaga kerja mengalami peningkatan maka upah akan turun dan penurunan upah tersebut akan mengakibatkan kerugian bukan menguntungkan karena penurunan upah tersebut menggambarkan daya beli masyarakat terhadap suatu barang. Daya beli masyarakat yang merupakan salah satu indikator dalam IPM yang rendah akan mengakibatkan perusahaan menurunkan jumlah produksinya dan tidak dapat menyerap kelebihan tenaga kerja sehingga permintaan dan penawaran tenaga kerja hampir tidak pernah seimbang dan pengangguran sering terjadi (Sukirno, 2005).

Menurut Keynes hubungan antara permintaan agregat dengan penyerapan tenaga kerja dijelaskan pada Gambar 2.2 dibawah ini:



Sumber: Keynes, John Maynard 1924

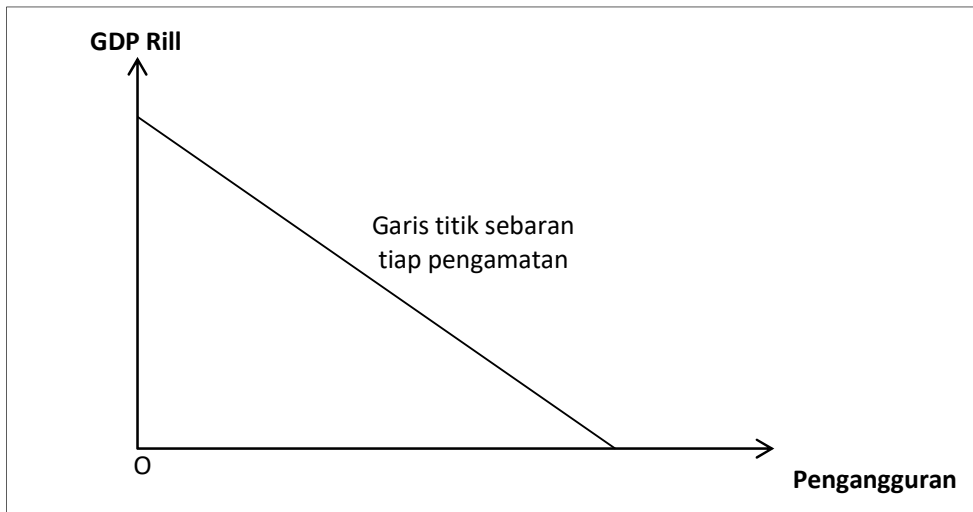
Gambar 2.2

Fungsi Permintaan Agregat dan Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan Gambar 2.2 dapat dilihat bahwa total permintaan agregat adalah D_1L_1 pada tingkat penyerapan tenaga kerja OL_1 , kemudian total permintaan agregat meningkat menjadi D_2L_2 dengan tingkat penyerapan tenaga kerja ke OL_2 . OL_f adalah

tingkat pekerjaan penuh (*full employment*). Awalnya, permintaan agregat (ADF) meningkat tajam seiring kenaikan penyerapan tenaga kerja yang disebabkan oleh permintaan masyarakat sehingga meningkatkan penerimaan penjualan produsen. Peningkatan penerimaan penjualan produsen memicu produsen untuk meningkatkan output sehingga diperlukan tambahan tenaga kerja yang mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran.

Berdasarkan Hukum Okun (*Okun's Law*) salah satu faktor yang menyebabkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Hukum Okun's menjelaskan bahwa setiap adanya peningkatan terhadap persentase pengangguran dalam suatu negara maka hal tersebut akan setara dengan terjadinya penurunan besarnya GDP sebesar 2 persen. Menurut Mankiw (2006) bahwa pertumbuhan ekonomi melalui GDP yang meningkat diharapkan dapat menyerap tenaga kerja karena dengan kenaikan pendapatan nasional dapat meningkatkan produksi. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan GDP dapat dikaitkan dengan tingginya tingkat pengangguran di suatu wilayah. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi (GDP) dengan pengangguran dijelaskan pada Gambar 2.3 dibawah ini:



Sumber: Mankiw, 2006

Gambar 2.3
Kurva Okun's Law

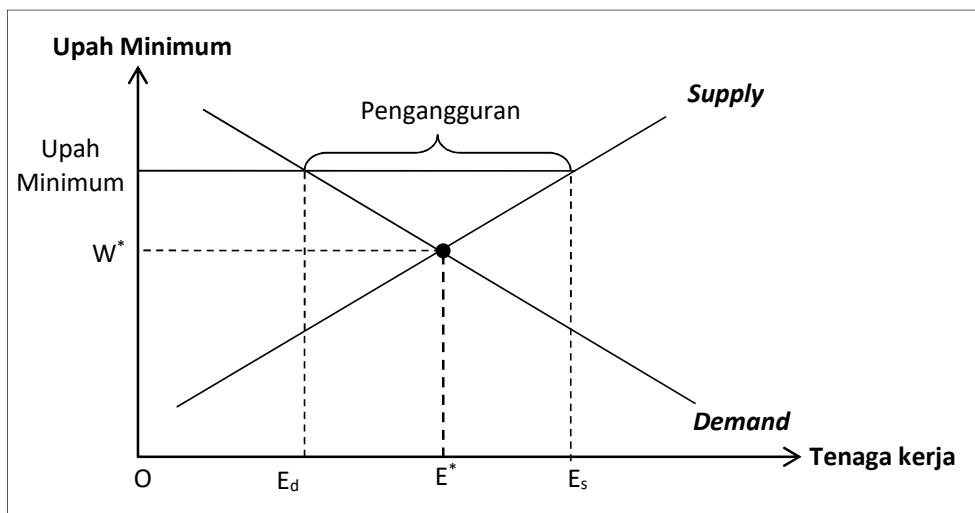
Berdasarkan Gambar 2.3 menjelaskan bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, hal ini terbukti dilihat dari garis titik sebaran tiap pengamatan serta kurvanya berslope negatif. Hal ini menunjukkan apabila pertumbuhan PDB meningkat maka akan meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja yang secara tidak langsung akan menurunkan tingkat pengangguran di negara berkembang dan sebaliknya jika GDP rill menurun akan meningkatkan pengangguran.

Menurut Sukirno (2000) bahwa salah satu faktor yang dapat menurunkan tingkat pengangguran yaitu besarnya investasi. Investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Melalui kegiatan investasi memungkinkan masyarakat untuk terus-menerus meningkatkan

kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Menurut Aqil, 2014 bahwa investasi memiliki peran penting dalam pembentukan lapangan pekerjaan, dengan adanya investasi akan menambah persediaan barang modal, hal ini akan berpengaruh ada peningkatan kapasitas produksi dan menciptakan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat pengangguran. Berdasarkan jenisnya, investasi dibagi menjadi dua jenis yaitu investasi yang sumber dananya berasal dari luar negeri atau disebut dengan Penanaman Modal Asing (PMA) dan investasi yang bersumber dari dalam negeri atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Menurut Mankiw (2003) bahwa pengangguran juga disebabkan oleh kekakuan upah yaitu kegagalan upah dalam menyeimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Salah satu hal yang menyebabkan kekakuan upah adalah undang-undang kebijakan upah minimum. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2016), upah minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha.

Menurut Suparmoko (dalam Kristiyana, 2011) menjelaskan bahwa penetapan upah minimum akan memberikan dampak pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Penetapan upah minimum akan mengurangi tingkat permintaan tenaga kerja dan akan menaikkan penawaran tenaga kerja sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara upah minimum dan pengangguran. Dampak kebijakan upah minimum dapat dijelaskan melalui Gambar 2.4 berikut ini:



Sumber: Borjas, George J, 2008

Gambar 2.4
Dampak Kebijakan Upah Minimum

Berdasarkan Gambar 2.4 menunjukkan bahwa pada awalnya pasar tenaga kerja berada pada keseimbangan dengan tingkat upah W^* dan tenaga kerja E^* . Kemudian

pemerintah mengenakan upah minimum sebesar W_1 . Selanjutnya diasumsikan bahwa upah minimum berlaku secara umum sehingga semua pekerja yang berada pada angkatan kerja terkena peraturan. Ketika pemerintah menetapkan upah terendah pada titik W_1 , permintaan tenaga kerja turun ke titik E_d . Sebagai akibat dari upah minimum beberapa pekerja akan kehilangan pekerjaannya dan menjadi pengangguran sebesar $E^* - E_d$. Tingkat upah yang tinggi untuk mempekerjakan pegawai menyebabkan penambahan pegawai sebesar $E^* - E_s$ yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja tidak dapat menemukan pekerjaan dan akan menambah jumlah pengangguran.

Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Konsep pembangunan manusia merupakan pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah (BPS Indonesia, 2016).

Menurut *United Nation Development Programme* (UNDP Indonesia), indikator-indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah:

1. *Longevity*, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau *life expectancy of birth* dan angka kematian bayi per seribu penduduk.
2. *Educational Achievement*, diukur dengan dua indikator, yaitu melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (*adult literacy rate*) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas (*the mean years of schooling*).
3. *Access to resource*, dapat diukur secara makro melalui PDB riil per kapita dengan terminologi *purchasing power parity* dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS Indonesia, 2016), Penghitungan metodologi nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sejak tahun 2011 telah mengalami perubahan. Terdapat beberapa indikator yang berubah diantaranya yaitu:

1. Angka melek huruf pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah
2. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Beberapa alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diantaranya yaitu:

1. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM yaitu indikator angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan.

Selain itu, karena angka melek huruf disebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik dan indikator PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

2. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Beberapa keunggulan penghitungan besarnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan metode baru yaitu:

1. Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif) yaitu:
 - a. Memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.
 - b. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
2. Menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, maka ketiga dimensi ini harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2016), indeks pembangunan manusia dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dalam mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup, selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator angka harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Rumus umum yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (Saputra, 2011) adalah sebagai berikut:

$$IPM = \frac{1}{3} (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3)$$

Dimana:

X_1 = Indeks kesehatan

X_2 = Indeks pendidikan

X_3 = Indeks daya beli masyarakat

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Saputra (2011), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0-100 dengan kategori sebagai berikut:

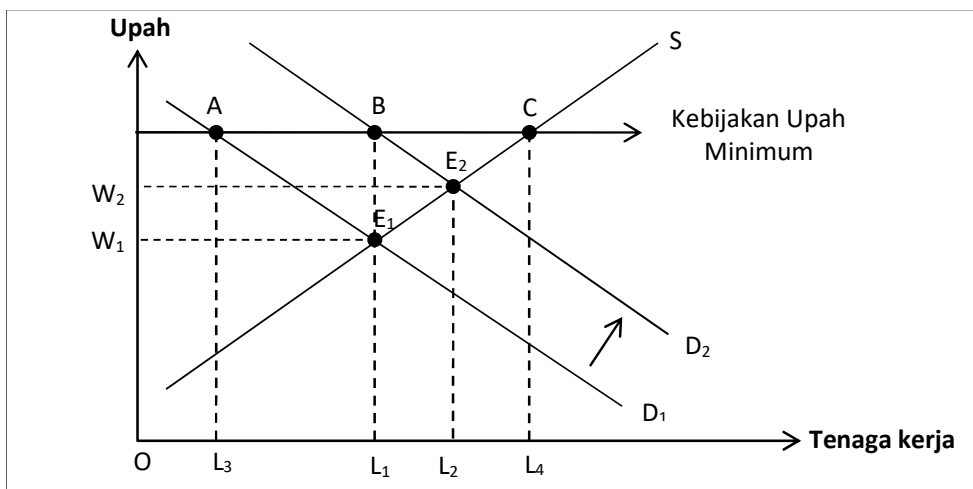
1. IPM lebih dari 80,0 : Tinggi

2. IPM antara 66,0-79,9 :Menengah atas
3. IPM antara 50,0-65,9 : Menengah bawah
4. IPM kurang dari 50,0 : Rendah

Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengangguran

Teori pertumbuhan baru menjelaskan bahwa peningkatan pembangunan manusia melalui pembangunan modal manusia (*human capital*) yang tercermin dalam tingkat pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas manusia sehingga akan meningkatkan permintaan tenaga kerja dan penurunan pada tingkat pengangguran. Menurut Teori Keynes bahwa melalui peningkatan daya beli masyarakat yang menunjukkan peningkatan dalam permintaan agregat dapat mempengaruhi kesempatan kerja. Apabila permintaan agregat rendah maka perusahaan akan menurunkan jumlah produksinya dan tidak dapat menyerap kelebihan tenaga kerja sehingga permintaan dan penawaran tenaga kerja hampir tidak pernah seimbang dan pengangguran sering terjadi. Menurut Hukum Okun (Okun’s Law) bahwa melalui peningkatan produktivitas yang disebabkan oleh meningkatnya indeks pembanguanan manusia akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan permintaan tenaga kerja sehingga banyak masyarakat yang dapat terserap di pasar tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Berdasarkan beberapa teori pengangguran yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan pengangguran mempunyai hubungan yang negatif melalui tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat akan suatu barang dan jasa yang dapat menyebabkan pergeseran terhadap permintaan tenaga kerja. Apabila nilai IPM suatu wilayah tinggi akan mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran dan sebaliknya ketika nilai IPM rendah dapat meningkatkan tingkat pengangguran di suatu wilayah tersebut. Keadaan ini dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut ini:



Sumber:

Borjas, George J, 2008

Gambar 2.5
Pergeseran Kurva Permintaan Tenaga Kerja

Berdasarkan Gambar 2.5 menunjukkan bahwa kurva permintaan tenaga kerja adalah D_1 dan kurva penawaran tenaga kerja adalah S_1 dengan titik E_1 sebagai titik keseimbangan dengan upah sebesar W_1 dan jumlah tenaga kerja sebesar L_1 . Setelah terjadi peningkatan permintaan tenaga kerja akibat dari meningkatnya IPM maka kurva permintaan tenaga kerja bergeser ke kanan dari D_1 menjadi D_2 dengan titik keseimbangan menjadi E_2 . Sebelum IPM meningkat, tingkat pengangguran sebesar L_3L_4 atau sebesar titik AC, Kemudian setelah IPM meningkat yang ditandai dengan kenaikan permintaan tenaga maka tingkat pengangguran turun sebesar L_1L_4 atau sebesar titik BC.

METODE PENELITIAN

Objek pada penelitian ini terdiri dari tingkat pengangguran sebagai variabel dependen sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi dan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) sebagai variabel independen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari internet melalui *website* resmi yang dipublikasikan yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan Provinsi Banten serta data pendukung yang diperoleh dari referensi jurnal penelitian.

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode data panel yaitu data dengan menggabungkan antara data runtun waktu dan data silang. Menurut (Nachrowi, 2006) terdapat tiga estimasi model yang akan dipilih diantaranya *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)*. Dalam memilih model yang paling tepat untuk regresi data panel terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan antaranya yaitu *Chow Test* dan *Hausmant Test*.

Menurut Suharyadi (2009), untuk mendeteksi pelanggaran asumsi terdapat empat asumsi yang harus terpenuhi diantaranya yaitu normalitas, multkolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Sedangkan, uji hipotesis pada penelitian ini yaitu uji t statistik, uji F statistik, dan uji determinasi. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini maka secara matematis model yang digunakan adalah:

$$TP = \alpha + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 INV_{it} + \beta_3 UMK_{it} + \varepsilon$$

Dimana:

- TP : Tingkat Pengangguran
IPM : Indeks Pembangunan Manusia
INV : Investasi
UMK : Upah Minimum Kabupaten/kota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Estimasi data panel memiliki tiga pendekatan yaitu *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*. Dalam menentukan model penelitian ini menggunakan *Chow Test* dan *Hausman Test*. Berdasarkan hasil ke-2 uji tersebut menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih tepat digunakan pada penelitian

ini. Hasil estimasi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Regresi Data Panel *Fixed Effect Model (FEM)*

Variabel Dependen = Tingkat Pengangguran (TP)
Variabel Independen = Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Investasi (INV) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	7.476910	3.345985	2.234592	0.0033
IPM	-2.345112	2.031292	-1.154493	0.0257
INV	-0.060505	0.008458	-7.153236	0.0000
UMK	-0.424266	0.173149	-2.450299	0.0205
<i>Koefisien Fixed Effect</i>				
Kabupaten Pandeglang	-0.219916			
Kabupaten Lebak	-0.256127			
Kabupaten Tangerang	0.135307			
Kabupaten Serang	0.134124			
Kota Tangerang	0.086631			
Kota Cilegon	0.117791			
Kota Serang	0.048790			
Kota Tangerang Selatan	-0.046600			
<i>Weighted Statistics</i>				
<i>R-squared</i>	0.852468	<i>Mean dependent var</i>		1.218637
<i>Adjusted R-squared</i>	0.767112	<i>S.D. dependent var</i>		0.435184
<i>S.E. of regression</i>	0.070305	<i>Sum squared resid</i>		0.153341
<i>F-statistic</i>	8.815659	<i>Durbin-Watson stat</i>		2.024639
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000002			
<i>Unweighted Statistics</i>				
<i>R-squared</i>	0.724534	<i>Mean dependent var</i>		1.004689
<i>Sum squared resid</i>	0.146113	<i>Durbin-Watson stat</i>		1.659449

Sumber: *Output Eviews7*

Berdasarkan hasil estimasi data panel menggunakan *Fixed Effect Model (FEM)* pada Tabel 4.3 diperoleh nilai determinasi (*Adjusted R²*) *Weighted Statistics* sebesar 0.767112 yang menunjukkan bahwa 76.7112% tingkat pengangguran pada kabupaten/kota di Provinsi Banten dapat dijelaskan oleh variabel independen pada penelitian ini sedangkan sisanya 23,2888% dijelaskan oleh variabel lain diluar model pada penelitian ini. Hasil estimasi ini diperkuat dengan nilai probabilitas F-statistik yang signifikan pada tingkat kepercayaan 5 % yaitu sebesar 0.000002 yang menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh secara nyata terhadap variabel dependen sehingga model penduga sudah layak untuk menduga parameter yang ada dalam fungsi.

Dalam pemilihan metode data panel pada penelitian ini menggunakan *Chow Test* dan *Hausman Test*. Hasil dari ke-2 pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Chow Test*, digunakan untuk memilih apakah model yang tepat digunakan pada penelitian yaitu *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*. Hasil pengujian diperoleh nilai F-statistik sebesar 11.321787 lebih besar dari n nilai d.f yaitu sebesar (7,29) dan probabilitas *Cross-Section F* sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari taraf nyata 5%. Berdasarkan hal tersebut model yang baik digunakan pada penelitian ini yaitu Model *Fixed Effect*
2. *Hausmant Test*, digunakan untuk memilih apakah Model *Random Effect* atau Model *Fixed Effect* yang akan digunakan pada penelitian. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai *Chi-Square* statistik sebesar 43.572986 dan nilai *Chi-Square* tabel sebesar 7,81. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model yang baik digunakan pada penelitian ini yaitu *Fixed Effect*.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil dari ke-4 uji asumsi klasik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh nilai *Jarque-Bera* sebesar 0,510891, nilai tersebut lebih kecil dari nilai *Chi-Square* yaitu 7,82 dan nilai *probability* sebesar 0,774571 lebih besar dari taraf nyata 5%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi dengan normal.

2. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa setiap variabel independen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi dan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) memiliki nilai *Correlation Matrix* kurang dari 0,80. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada model penelitian ini tidak mengandung multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diperoleh nilai *Sum Squared* pada *Weighted Statistics* sebesar 0.153341 dan nilai *Sum Squared* pada *Unweighted Statistics* sebesar 0.146113. Nilai yang diperoleh bahwa *Sum Squared* pada *Weighted Statistics* lebih besar dari nilai *Sum Squared* pada *Unweighted Statistics* sehingga model regresi data panel pada penelitian ini tidak terdeteksi adanya heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin-Watson yaitu sebesar 2.024639 dengan nilai $n = 40$ dan $k = 3$, maka diperoleh nilai tabel Durbin-Watson yaitu d_L sebesar 1,119 dan d_U sebesar 1,924. Hal ini atas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson berada pada daerah d_U dan $4-d_U$. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi data panel pada penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran

Berdasarkan hasil regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan

dengan arah yang negatif terhadap tingkat pengangguran. Apabila indeks pembangunan manusia meningkat maka tingkat pengangguran di Provinsi Banten akan menurun.

Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh (Todaro, 2000) bahwa melalui meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capita*) dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Melalui investasi pendidikan diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Peningkatan produktivitas dapat mempengaruhi kesempatan kerja yaitu dengan adanya peningkatan produktivitas maka terjadi penurunan biaya produksi per unit barang. Penurunan biaya produksi per unit barang akan menurunkan harga per unit barang. Jika harga barang turun maka permintaan terhadap barang naik yang akan mendorong pengusaha untuk menambah permintaan tenaga kerja, sehingga dengan penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak dapat mengurangi tingginya tingkat pengangguran.

Pengaruh Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran

Berdasarkan hasil regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan bahwa variabel investasi berpengaruh signifikan dengan arah yang negatif terhadap tingkat pengangguran. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar investasi yang ditanam maka akan menurunkan tingkat pengangguran dan begitu juga sebaliknya. Hasil pada penelitian ini sesuai dengan Teori Harrod-Domar yang menjelaskan bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi. Peningkatan produksi akan menciptakan kesempatan kerja yang selanjutnya akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Ketika permintaan tenaga kerja meningkat maka tingkat pengangguran akan menurun.

Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Terhadap Tingkat pengangguran

Berdasarkan hasil regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) meningkat maka tingkat pengangguran di Provinsi Banten akan menurun.

Hasil pada penelitian ini sesuai dengan Teori model dual sektor yang menyatakan bahwa turunnya tingkat pengangguran ini disebabkan karena setelah terdapat kebijakan upah minimum yang meningkat setiap tahunnya menyebabkan permintaan tenaga kerja di sektor formal lebih sedikit sehingga masyarakat memilih berpindah ke sektor informal. Berpindahannya masyarakat ke sektor informal maka mereka akan tetap mendapatkan pekerjaan dan tidak kehilangan pekerjaannya (Wijaya, 2014).

Estimasi data panel memiliki tiga pendekatan yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Dalam menentukan model penelitian ini menggunakan *Chow Test* dan *Hausman Test*. Berdasarkan hasil ke-2 uji tersebut menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih tepat digunakan pada penelitian ini.

Hasil estimasi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) diperoleh nilai koefisien intersep (C) yaitu 7.476910, koefisien Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu -2.345112, koefisien investasi (INV) yaitu -0.060505 dan koefisien Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) sebesar -0.424266. Nilai determinasi (*Adjusted R²*) *Weighted Statistics* sebesar 0.767112 yang menunjukkan bahwa 76.7112 persen tingkat pengangguran pada kabupaten/kota di Provinsi Banten dapat dijelaskan oleh variabel bebas pada penelitian ini sedangkan sisanya 23,2888 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model pada penelitian ini. Hasil estimasi ini diperkuat dengan nilai probabilitas F-statistik yang signifikan pada tingkat kepercayaan 5 % (0,05) yaitu sebesar 0.000002 yang menunjukkan bahwa semua variabel bebas berpengaruh secara nyata terhadap variabel terikat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka semakin kecil tingkat pengangguran.
2. Variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Hal ini berarti bahwa semakin besar nilai investasi maka semakin kecil tingkat pengangguran.
3. Variabel Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) maka semakin kecil tingkat pengangguran.
4. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi dan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Hal ini terlihat dari besarnya nilai F-statistik yaitu 8.815659 dan nilai probabilitasnya sebesar 0.000002 < taraf 5%.

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka penulis memberikan saran, baik kepada pemerintah maupun kepada pembaca diantaranya:

1. Pemerintah Provinsi Banten diharapkan lebih memperhatikan pembangunan manusia. Melalui peningkatan pembangunan manusia diharapkan dapat meningkatkan kualitas manusia dan pada akhirnya dapat mengurangi tingginya tingkat pengangguran yang terjadi di Provinsi Banten.
2. Pemerintah Provinsi Banten hendaknya berinvestasi yang berorientasi pada padat karya. Dengan melakukan investasi padat karya diharapkan dapat menyerap besarnya angkatan kerja yang siap bekerja sehingga masalah pengangguran di Provinsi Banten dapat berkurang.

3. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian lanjutan dengan kasus yang sama dan dengan penambahan data, menggunakan metode lain atau dengan menambahkan variabel yang diduga dapat mempengaruhi tingkat pengangguran sehingga diperoleh informasi yang lebih akurat.

REFERENSI

- Abbas. (2010). *Strategi dan Pilihan Mengajar Berbasis Sekolah*. Jakarta. Grassindo.
- Aqil, Muhammad dkk. (2014). *Determinants Of Unemployment In Pakistan*. Ejournal of Physical and Social Sciences, 4(4).
- Borjas, George. 2008. *Labor Economics*. McGraw-Hill Irwin. United States.
- Gilarso, T. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta. Kanisius.
- Gujarati, Damodar N. 2006. *Essentials Of Econometrics*. Jakarta: Erlangga.
- Juanda, Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Kedua. Bogor. IPB Press.
- Komalasari, Yeyen dan Trimurti, Christimulia Purnama (2014). *Determinants of Unemployment: Empirical Evidences From 7 Province In Indonesia*. Ejournal Ekonomi Pembangunan, 2(8). Universitas Udayana. Bali.
- Mankiw, N.Gregory. 2003, *Teori Makro Ekonomi*, Edisi Kelima, Alih Bahasa. Imam Nurmawan, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Nachrowi D, Hardius Usman. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nanang, Fattah. 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*. Bandung. Bani Quraisy.
- Napitulu, Apriliyah S. 2007. *Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penurunan Penduduk Miskin di Sumatera Utara*. Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara.
- Nurcholis, Muhammad. 2014. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 12(1). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rahmadin, dkk. (2013). *Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Aceh*. Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(4). Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
- Simanjuntak, Payaman J. 2001. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Simanjuntak, Payaman J. 2003. *Produktivitas Kerja Pengertian dan Ruang Lingkupnya*. Prisma. Jakarta.

Sisnita, Aisyah. 2017. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung (Periode 2009-2015)*. Karya Ilmiah. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RDN*. Bandung: Alfabeta.

Suharyadi dan Purwanto. 2009. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.

Sukirno, Sadono. 2008. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pestada.

Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.